

Harian	: Mercusuar
Hari, tanggal	: Sabtu, 01 Oktober 2011
Keterangan	: Halaman 1 Kolom 4-6; Halaman 11 Kolom 1-3
Entitas	: Kabupaten Tojo Una-una dan Buol

TOUNA DAN BUOL

Terima Dana PPID Rp51,68 M

PALU, MERCUSUAR- Dua kabupaten di Provinsi Sulteng memperoleh kucuran dana puluhan miliar dalam program Percepatan Pembangunan infra struktur Daerah (PPID) di Kemenakertrans, yaitu Kabupaten Tojo Unauna dan Kabupaten Buol.

Kabupaten Buol memperoleh dana PPID sebesar Rp41,68 miliar, sedangkan Kabupaten Touna memperoleh kucuran dana sebesar Rp10 miliar. Dengan demikian, total dana yang diterima oleh kedua daerah itu adalah Rp51,68 miliar. Bupati Touna, Damsik Ladjanani dikonfirmasi melalui telepon genggam, Jum'at (30/9),

membenarkan kalau kabupaten yang dipimpinnya itu akan memperoleh kucuran dana PPID sebesar Rp 10 miliar. "Begitu dalam daftar daerah penerima PPID yang kami terima," ujarnya.

Hanya saja, kata Bupati Damsik, dana itu belum masuk di rekening Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Touna karena masih diproses. "Dana belum diterima karena sekarang masih diproses, Touna memperoleh anggaran Rp10 miliar," ujarnya.

Menanyakan sikap Pemkab Touna sekaitan daerah itu akan mendapat kucuran dana PPID, waku sejumlah daerah penerima menolaknya karena

19 KABUPATEN PENERIMA DANA PPID	
1.	Sarolangun Rp24,68 miliar
2.	Ogan Ilir Rp10 miliar
3.	Bengkulu Utara Rp76,77 miliar
4.	Mesuji Rp57,89 miliar
5.	Kapuas Rp17,2 miliar
6.	Pulang Pisau Rp33,07 miliar
7.	Paser Rp30,38 miliar
8.	Buol Rp41,68 miliar
9.	Tojo Unauna Rp10 miliar
10.	Pinrang Rp7 miliar
11.	Takalar Rp 18,04 miliar
12.	Wajo Rp30 miliar
13.	Muna Rp20 miliar
14.	Bima Rp20 miliar
15.	Maluku Tengah Rp30,08 miliar
16.	Mimika Rp15 miliar
17.	Keenom Rp20 miliar
18.	Manokwari Rp22,16 miliar dan
19.	Teluk Wondama Rp16 miliar.

Baca PPID di hal.11

Banyak Yang Menolak

• PPID

sambungan dari hal. 1

pertimbangan batas waktu penggunaannya yang sangat mepet, Damsik mengaku hal itu tak masalah bagi Pemkab Touna karena plotting penggunaan anggarannya sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan. "Juknisnya penyerapan sampai 30 persen," katanya.

Sementara itu, Bupati Buol Amran Batalipu dikonfirmasi, hingga berita ini naik cetak belum memberikan jawaban.

Sebagaimana diketahui, 19 Kawasan di sejumlah daerah di Indonesia mendapat dana miliaran rupiah dalam Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kemenakertrans.

Proyek inilah yang membuat dua pejabat Kemenakertrans, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suwisana dan Kabag Program Evaluasi P2KT Dadong Irbarelawan, ditangkap KPK. Selain mereka berdua, ada juga dari pihak swasta, Dharnawati yang terseret kasus ini.

Alokasi dana ini disahkan oleh 4 Pimpinan Banggar pada 22 Juli 2011 lalu. Selain itu, Menteri Keuangan Agus W Martowardjojo juga ikut meneken pengesahan itu.

Berikut adalah daftar kesembilanbelas daerah yang mendapat alokasi dana proyek tersebut

yang total keseluruhannya berjumlah Rp500 miliar.

Sebelumnya, Pemkab Gunung Mas (Gumas) dan Katirgan menyatakan menolak PPID transmigrasi dari Kemenakertrans. Padahal program tersebut sudah diusulkan dan dananya disetujui oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gumas Edwin Yustian kepada *Tabengan* di Kuala Kurun, Kamis (15/9), mengatakan, Kemenakertrans memang menawarkan untuk melaksanakan program PPID di Gumas, dananya sudah dianggarkan dalam APBN-P 2011.

Penawaran ini mengingatkan Gumas termasuk salah satu: kabupaten yang akan membuka kawasan transmigrasi yang dimulai pada tahun anggaran 2012 mendatang. Sebanyak 20 kabupaten di Indonesia menerima dana kucuran, tiga di antaranya di Kalteng, yakni Gumas, Kapuas, dan Pulang Pisau.

Dikatakan Edwin, pada dasarnya program yang ditawarkan Kemenakertrans sangat sinkron dengan apa yang telah direncanakan Pemkab untuk membuka kawasan transmigrasi pada 2011 dan pembangunan fisik 2012. Untuk mematangkan rencana tersebut, juga telah diturunkan tim gabungan dan konsultan ke lapangan.

Namun, dalam perkembangan akhirnya Pemkab Gumas menolak PPID, alasannya waktu

pelaksanaan pembangunan sempit. Selain itu, meski dana program percepatan pembangunan infrastruktur tersebut memang benar adanya, namun dalam penganggaran dinilai tidak sesuai mekanisme.

Kemudian, untuk meloloskan anggaran tersebut, pemerintah daerah diminta menyediakan 10 persen dari nilai anggaran yang akan dikucurkan. "Melihat kebijakan ini, kami secara tegas menolak," katanya.

Sementara di Katingan, Pemkab setempat tidak berani mengusulkan program PPID. "Kami memang sengaja tidak mengusulkan, sebab proyek pembangunan tersebut sangat berisiko," kata Kepala Dinsosnakertrans Katingan, Eka Murni Kamarianti.

Pertimbangannya, jika program tersebut dimasukkan dalam APBN-P kemudian disetujui, waktu pelaksanaannya di lapangan sangat singkat, padahal program ini merupakan program fisik. Untuk melakukan tender saja diperlukan waktu satu bulan belum realisasinya seperti pembangunan jalan dan prasarana lainnya di lapangan.

Belum lagi faktor cuaca sekarang ini jelas tidak mendukung, sehingga sangat rawan, sedangkan dana yang dikucurkan miliaran rupiah. "Intinya kami tidak berani mengusulkan," kata Eka. DWT/RC